

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2014)

Andi Kholidi¹⁾, H. Zamzami dan Asep Machpudin²⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi*

²⁾*Dosen Pembimbing*

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze whether the local own Revenue, the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Sharing Fund have affect of simultant and partial the allocation of Capital Expenditure in the District / City in the province of Jambi.

The analytical method used in this research is quantitative method, by using multiple regression testing, to test classic assumptions first before getting the best research model. Variables used in this research is the Local own revenue, the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Sharing Fund made as independent variables. While Capital Expenditure as a dependent variable in this study. The sample in this study are 11 districts / city in the province of Jambi, the Year of the observations from 2009 to 2014.

The results of this study prove that simultaneously all independent variables namely Local own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Sharing Fund significant effect on Capital Expenditure at Regency / City in the province of Jambi. This can be explained by the results demonstrated statistically significant F test with a score of 0.000 was below the level of 5% and adjusted R2 value of 62.5% Capital Expenditures variables can be explained by the independent variable that exists is Local own Revenue, General Allocation Fund, Funds Special allocation, and Sharing Fund effect on Capital Expenditure, while the remaining 37.5% is influenced by other variables that are beyond the study models.

While partially Variable Local own Revenue, and the Special Allocation Fund does not significantly affect Capital Expenditure, while the variable General Allocation Fund, and Sharing Fund significant effect on Capital Expenditure, meaning that any increase in General Alocation Fund and Sharing Fund will give rise On allocation of Capital Expenditures, and vice versa.

Keywords :Local own Revenue, General Allocation Fund , Special Allocation Fund , Sharing Fund, and Capital Expenditure.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian menggunakan regresi berganda, dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang di jadikan sebagai variabel bebas, Sedangkan Belanja Modal sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi, dengan Tahun Observasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil statistik Uji F dengan nilai signifikan sebesar 0,000 berada di bawah level 5% dan nilai *adjusted R2* sebesar 62,5% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang ada yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan sisanya 37,5 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang diluar model penelitian ini.

Sedangkan secara parsial Variabel Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya setiap kenaikan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil akan mengakibatkan kenaikan Pada Alokasi Belanja Modal, begitu pula sebaliknya.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Era Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta ini. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang lebih dikenal dengan “otonomi Daerah”. Istilah otonomi daerah bukanlah hal yang baru karena sudah ada seiring dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan revisi terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar seperti yang tercantum Dalam pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Fenomena yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal. Bila kita lihat Penjabaran APBD hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah di setiap kabupaten-kota di provinsi jambi yaitu rata-rata kurang dari 30 % dan sisanya sebesar 70% untuk alokasi belanja operasi yang di dalamnya meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. sedangkan anggaran belanja yang tertinggi di dalam struktur APBD Kabupaten/kota di provinsi jambi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya dari total anggaran belanja daerah.

Fenomena yang lain yang terjadi dalam realita anggaran di daerah bahwa, sebagian besar

Pemerintah Daerah masih memiliki ketergantungan yang amat besar terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat, khususnya pada kabupaten/kota di provinsi jambi. karena Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satunya melalui Dana Perimbangan yang terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU) dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 23/2014).

Permasalahan Dana Alokasi Umum (DAU) terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang dana ini. Bagi pemerintah pusat, DAU dijadikan sebagai instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Sedangkan bagi pemerintah daerah, DAU dimaksudkan untuk mendukung kecukupan pendapatan daerah. Permasalahannya akan timbul ketika pemerintah daerah meminta DAU sesuai dengan kebutuhannya. Ditambah dengan pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya ya dan cenderung tidak efisien.

Halim (2001) mengaskan bahwa tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Penegasan ini menunjukkan bahwa bagi daerah-daerah yang memiliki celah fiskal yang tinggi perlu memperkuat struktur anggaran belanjanya, ini bukan berarti daerah-daerah yang memiliki celah fiskal rendah tidak perlu memperkuat struktur belanja. Dengan memperkuat struktur belanja daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Selain fenomena yang telah di jelaskan di atas, fenomena lain yang dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa terdapat ketidak konsistenan dalam pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana Alokasi khusus, dan Dana Bagi hasil terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) melakukan pengujian DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten/kota se Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh positif terhadap belanja Modal Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2013) yang menunjukkan bahwa belanja Modal dipengaruhi oleh

PAD dan DAK, sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja Modal. Sukartono dan Masdjojo (2009) melakukan pengujian terhadap pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Belanja Daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masdjojo dan sukartono (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdjojo dan sukartono terletak pada variabel dependen yang diteliti serta waktu dan objek penelitian. Jika pada penelitian masdjojo dan sukartono variabel dependen yang diteliti adalah Belanja Daerah, maka pada penelitian ini lebih spesifik lagi dengan meneliti belanja Modal, selain itu waktu penelitian dari masdjojo dan sukartono selama tiga tahun dari tahun 2006-2008, dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota di Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini kurun waktunya selama enam tahun dimulai pada tahun 2009-2014 dengan objek penelitian kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
3. Apakah Dana Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
5. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana

Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?

2. Menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
3. Menguji pengaruh Dana Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
4. Menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
5. Menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu Akuntansi sektor publik.
2. Bagi civitas akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
3. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
4. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1.1. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja Daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dengan adanya belanja modal tersebut diharapkan adanya *multiplier effect*, secara makro dan mikro bagi perekonomian nasional, dan khususnya bagi daerah (Halim, 2013)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi dan umum.

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, belanja Modal Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pasal 53 ayat (2) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran, maka Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama yakni:

1. Belanja Modal tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan.
5. Belanja Modal.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran Pendapatan asli daerah dapat menjadi Indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*). Pendapatan asli daerah memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.

2.1.3. Dana Alokasi Umum

Tentang dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurnagi dengan belanja Pegawai (Halim, 2009).

2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah (UU No. 33 tahun 2004). Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Pengalokasian DAK

- a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi Balanja PNSD
- b) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
- c) Karakteristik Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah

2. Penghitungan Alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan yaitu:

- a) Penentuan daerah tertentu yang menerima Alokasi DAK
- b) Penentuan Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah.

3. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

2.1.5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil Pajak.
2. Dana Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.

2.1.6. Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah didapatkan melalui hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana dan prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian Sudarwadi (2015) menemukan bahwa; Semakin Besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah, maka pengeluaran pemerintah Daerah terhadap belanja Modal akan semakin besar pula sehingga aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tersebut akan bertambah pula. Senada dengan sudarwadi, Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), kemudian penelitian Siswanto dan Kusnandar (2012), serta Putro (2011), memberikan bukti empiris bahwa PAD berpengaruh Positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Hal ini sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.

2.1.7. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberina dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil Penelitian Darwanto dan Yustikari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dan Belanja Modal. Putro (2011) mengambil sampel 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal. Hasil Penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat Bukti empiris tersebut, mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

2.1.8. Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan wewenang desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya. Kepentingan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004)

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) yang meneliti pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah daerah di kabupaten/kota se Indonesia, Sumarni (2008) yang meneliti tentang pengaruh Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah di kabupaten/kota di Provinsi DIY, serta Sukartono dan Masdjojo (2009) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah, yang keseluruhan penelitian tersebut menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal,

2.1.9. Hubungan Antara Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu: Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.

Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Bagi Hasil, dan menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang Besar pula.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi di atas adalah sebagai

berikut:

- H₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
- H₂ = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- H₃ = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- H₄ = Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- H₅ = Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

3. METODOLOGI

3.1. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

3.1.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang menjadi titik perhatian adalah Belanja Modal sebagai Variabel yang diamati atau variabel dependen, dan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel yang mempengaruhi variabel Belanja Modal atau variabel bebas dalam penelitian ini.

3.1.2. Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena subjek penelitian merupakan tempat dimana data tentang variabel yang akan diamati berada. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek Penelitian adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

3.2. Metode Penelitian

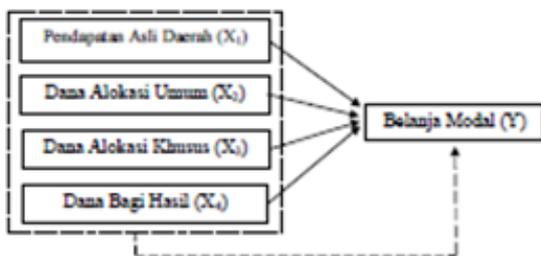
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk melihat secara empiris sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel yang diteliti.

3.3. Desain Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka desain

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 1
Desain Penelitian



3.4. Defenisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

3.4.1. Defenisi Operasional

Variabel bebas (*independent variabel*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), variabel terikat (*dependent variabel*) yang merupakan fokus perhatian utama adalah Belanja Modal (BM). Untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah didefenisikan sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah adalah total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Alokasi Umum adalah total dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi umum dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar berupa gaji PNS. Formula tersebut dapat hitung dengan rumus:

$$DAU = AD + CF$$

Dimana :

- DAU = Dana Alokasi Umum
- AD = Alokasi Dasar
- CF = Celah Fiskal

$$CF = KbF - KpF$$

Dimana :

- CF = Celah Fiskal
- KbF = Kebutuhan Fiskal
- KpF = Kapasitas Fiskal

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

4. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator Dana Bagi Hasil adalah: 1) Dana Bagi Hasil Pajak, 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA. Variabel Dana Bagi Hasil ini diukur dengan menggunakan skala rasio.
5. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah belanja untuk pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset dengan menggunakan skala rasio. Indikator belanja Modal adalah :1).Belanja Tanah, 2). Belanja Peralatan dan Mesin, 3). Belanja Gedung dan Bangunan, 4). Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan, 5). Belanja Aset Lainnya

3.5. Sumber data dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam Penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, yang dikolaborasikan dengan Data Keuangan dari situs Dirjen perimbangan Keuangan Daerah serta ditunjang dengan Data Daerah dalam Angka yang di Publish oleh BPS masing-masing Kabupaten/kota.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis Regresi Berganda (*multiple regression*), dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukana analisis statistik deskripif, uji Nomalitas dan uji asumsi klasik.

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi linier berganda, sebelum melakukan analisis data lebih lanjut dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*), maka terlebih dahulu ada baiknya dilakukan uji Asumsi klasik yang terdiri dari: uji multikolinearitas, uji

autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas, Ghazali (2011).

3.6.2. Pengujian Hipotesis

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Regresi berganda (*Multiple Regression*), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta PAD + \beta DAU + \beta DAK + \beta DBH + e$$

Dalam hal ini

- BM = Belanja Modal
- α = Intercept Persamaan Regresi (Konstanta)
- β = Koefisien Regresi variabel independen
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- DBH = Dana Bagi Hasil
- e = Koefisien error / tingkat kesalahan

1. Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1) Merumuskan Hipotesis

H_0 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

H_a : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2) Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan, misalnya $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan $df = (n-k) + (k-1)$, $V_1 = N-1$, $V_2 = n-$

k , digunakan untuk mencari nilai F kritis dari tabel F.

3) Nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel ($df = (n-k) + (k-1)$, $V_1 = n-1$, $V_2 = n-k$, $\alpha = 5\%$)

a. Bila F hitung $< F$ tabel dengan probabilitas $> 0,05$ maka, $H_0 =$ diterima dan $H_a =$ ditolak, artinya secara bersamaan semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Sebaliknya jika F hitung $> F$ tabel dengan probabilitas $\leq 0,05$ maka $H_0 =$ ditolak dan $H_a =$ Diterima, artinya secara bersamaan semua variabel bebas

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas (*Independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent Variable*) secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1) Merumuskan Hipotesis

H_0 : Pendapatan Asli Daerah tidak Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

H_a : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

H_0 : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

H_a : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi

H_0 : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

H_a : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi

H_0 : Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi

H_a : Dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

- 2) Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan, misalnya $\alpha = 5\%$ dan $df = n-k$, digunakan untuk mencari nilai t kritis dari t tabel.
- 3) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel
 - a. Bila nilai t hitung < nilai t tabel dengan probabilitas > 0.05 Maka, $H_0 : b_1 = 0$ diterima, $H_a : b_1 \neq 0$ ditolak, artinya secara individual variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
 - b. Sebaliknya bila t hitung > nilai t tabel dengan probabilitas ≤ 0.05 maka $H_0 : b_1 = 0$ ditolak, dan $H_a : b_1 \neq 0$ diterima, artinya secara individual masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Deskriptif

Sebelum melakukan pembahasan mengenai data secara statistik harus terlebih dahulu memperhatikan deskriptif data kabupaten/kota yang telah ditentukan sebagai objek penelitian. Statistik deskriptif menggambarkan variabel-variabel independen dan dependen secara statistik dalam penelitian ini. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH). Sedangkan variabel dependennya adalah belanja Modal (BM), berikut ini adalah uji statistik deskriptif:

Tabel. 1
Analisis Deskriptif Variabel Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	66	1850,67	246427,70	43972,2904	36622,84074
DAU	66	58482,24	678620,17	392396,0042	119206,16082
DAK	66	,00	61138,86	38926,1705	15563,23520
DBH	66	13853,21	567051,45	168598,8472	122719,11994
BM	66	24280,39	586420,74	210383,9776	97731,67621
Valid N (listwise)	66				

Sumber : Output SPSS 23 (dalam Juta Rupiah)

Hasil uji statistik Deskriptif pada tabel. 1 di atas

dapat dilihat bahwa dari jumlah sample (N) sebanyak 66, dimana rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar Rp 43,97 Milyar dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah Rp, 1,85 Milyar dan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi Sebesar Rp. 246,42 Milyar dengan standar Deviasi sebesar Rp. 36,62 Milyar dari rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan penting bagi daerah dalam jangka panjang yang berpengaruh besar terhadap penerimaan daerah.

Rata-rata jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 392,39 Milyar dengan jumlah Dana Alokasi Umum terendah sebesar Rp58,48 Milyar dan jumlah Dana Alokasi Umum tertinggi sebesar Rp678,62 Milyar dengan standar deviasi sebesar Rp. 119,20 Milyar dari rata-rata Dana Alokasi Umum.

rata-rata jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 38,92 Milyar dengan jumlah Dana Alokasi Khusus terendah sebesar Rp 0, dan jumlah dana Alokasi Khusus tertinggi sebesar Rp. 61,13 Milyar dengan standar deviasi sebesar Rp. 15,56 Milyar dari rata-rata DAK.

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.1 rata-rata jumlah dana bagi hasil (DBH) pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi jambi sebesar Rp.168,59 Milyar dengan jumlah dana bagi hasil terendah sebesar Rp. 13,85 Milyar dan jumlah dana bagi hasil tertinggi sebesar Rp. 567,05 Milyar dengan tingkat deviasi sebesar 122,71 Milyar dari rata-rata Dana Bagi Hasil.

Dilihat dari statistik deskriptif pada tabel 4.1 rata-rata jumlah belanja modal pemerintah kabupaten/kota di provinsi jambi sebesar Rp. 210,38 Milyar dimana belanja modal terendah sebesar Rp. 24,28 Milyar dan belanja modal tertinggi sebesar Rp. 586,42 Milyar dengan tingkat deviasi sebesar Rp. 97,73 Milyar dari rata-rata Belanja modal.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

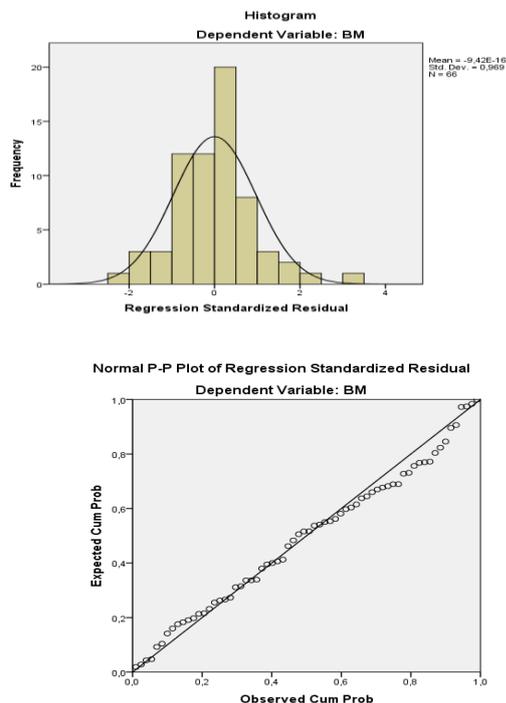
Pengujian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum pengujian hipotesis dilakukan dengan meliputi beberapa pengujian yakni:

4.1.2.1. Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal, dalam penelitian ini uji normalitas dapat dilihat dari grafik histogram maupun penyebaran data (titik) pada *normal p-plot of regression Standardized residual* variabel independen. Berikut ini adalah hasil uji normalitas

data dengan analisis grafik *Normal Probability Plot*.

Gambar. 1
Hasil Normal Probability Plot



Hasil *normal probability plot* pada gambar. 1 di atas dapat diketahui bahwa sumbu menyebar disekitar garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa *normal probability plot* berdistribusi secara normal.

Uji Statistik lain yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik kolmogorov-Smirnov (K-S). Yang dilakukan dengan membuat Hipotesis :

H₀ : Data Residual berdistribusi Normal

H_a : Data Residual tidak berdistribusi Normal.

Berikut ini adalah hasil uji normalitas data dengan uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*:

Tabel. 2
Hasil Uji Statistik Normalitas menggunakan Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (KS)

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.57969,55269
Most Extreme Differences	Absolute	0,084
	Positive	0,084
	Negative	-0,047
Kolmogorov-Smirnov Z		0,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 23

Besarnya Nilai (K-S) adalah sebesar 0,084 dan tingkat signifikan pada 0,200 hal ini berarti H₀

diterima dan H_a ditolak yang artinya data residual berdistribusi Normal

4.1.2.2. Uji Multikolinieritas

Tabel. 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
PAD	,496	2,015	Terbebas
DAU	,431	2,320	Terbebas
DAK	,374	2,675	Terbebas
DBH	,420	2,379	Terbebas

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS 23

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH mempunyai nilai VIF dibawah angka 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 10% (= 0,10), hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen terbebas dari masalah multikolinieritas.

4.1.2.3. Uji Autokorelasi

Tabel. 4
Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,805 ^a	,648	,625	59840,01725	1,818

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS 23

Hasil uji autokorelasi pada tabel. 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai durbin watson adalah 1,818 dengan jumlah observasi (n) sebanyak 66, jumlah variabel bebas yang digunakan (k) sebanyak 4, dan tingkat signifikansi sebesar 0,05, maka didapat nilai dl=1,471 dan du=1,731. Oleh karena nilai DW 1,818 lebih besar dari batas atas (du) 1,731 dan kurang dari 4 - 1,731 (4 - du), maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H₀ yang menyatakan bahwa tidak ada auto korelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi (dapat dilihat dari tabel keputusan Autokorelasi) berikut:

Tabel. 5
Pengambilan Keputusan Ada tidaknya Autokorelasi

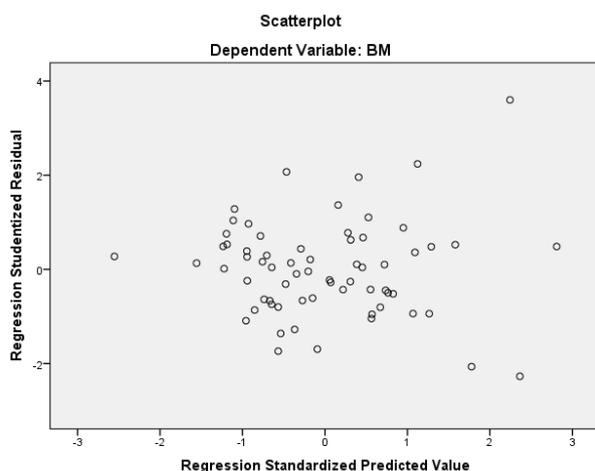
Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi positif	Tolak	4 - dl < d < 4
Tidak ada korelasi negatif	Tidak ada keputusan	4 - dl ≤ d ≤ 4 - dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	du < d < 4 - du

Sumber : Ghozali (2011)

4.1.2.4. Uji Heterokedastisitas

Uji statistik yang digunakan adalah uji *scatterplot* dan yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah variabel Dependen, dan sumbu X adalah residual. Berikut ini adalah hasil uji *scatterplot* Model:

Gambar. 2
Hasil Scatterplot



Hasil *Scatterplot* pada gambar. 2 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas, secara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik yakni uji Normalitas, uji Autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji Heterokedastisitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terbebas dari asumsi klasik

4.1.3. Hasil Analisis Regresi

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah Belanja Modal (BM) dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Model regresi linier berganda tersebut secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta PAD + \beta DAU + \beta DAK + \beta DBH + e$$

Tabel. 6
Hasil Analisis Regresi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-53813,712	42808,827		-1,257	,214
PAD	-,223	,288	-,083	-,774	,442
DAU	,376	,095	,459	3,968	,000
DAK	,577	,780	,092	,740	,462
DBH	,616	,093	,774	6,605	,000

a. Dependent Variable: BM
Sumber : Output SPSS 23

Dari tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BM = -53813,712 - 0,223 PAD + 0,376 DAU + 0,577 DAK + 0,616 DBH + e$$

Model regresi tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta (α) sebesar -53813,712 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata Belanja Modal tiap pemerintah Kabupaten/kota di provinsi Jambi mengalami pengurangan sebesar 53.823 Milyar
2. Variabel PAD menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,223 menyatakan bahwa jika setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 Milyar maka akan mengurangi Belanja Modal sebesar 223 Juta, dengan asumsi nilai variabel DAU, DAK dan DBH dianggap konstan atau tetap.
3. Untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,376 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi umum (DAU) sebesar 1 Milyar akan berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal sebesar 376 Juta, dengan asumsi nilai variabel PAD, DAK, dan DBH dianggap konstan atau tetap.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,577 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1 Milyar akan menyebabkan peningkatan Belanja Modal sebesar 577 Juta, dengan asumsi nilai variabel PAD, DAU dan DBH di anggap konstan atau tetap.
5. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien regresi sebesar 0,616 artinya jika setiap kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 1 Milyar akan menyebabkan peningkatan Belanja Modal sebesar 616 Juta, dengan asumsi nilai

variabel PAD, DAU dan DAK dianggap konstan atau tetap.

4.1.4. Hasil Pengujian Hipotesis

Uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap persamaan regresi menyimpulkan bahwa model atau persamaan regresi tersebut layak digunakan dalam model persamaan matematis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Statistik F dan Uji Statistik t dan Koefisien determinasi

4.1.4.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam Uji statistik F ini adalah sebagai berikut

- H_0 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
- H_a : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

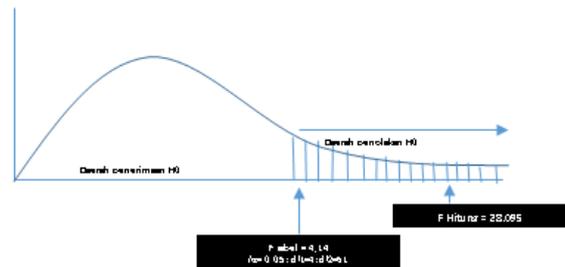
Tabel. 7
Hasil Uji Signifikansi Simultan Variabel PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap BM

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	402415747281,254	4	100603936820,313	28,095	,000 ^b
Residual	218430487525,948	61	3580827664,360		
Total	620846234807,202	61	3580827664,360		

a. Dependent Variable: BM
 b. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK
 Sumber : Output SPSS 23

Dari Uji Statistik F didapat nilai F Hitung sebesar 28,095 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Variabel Belanja Modal. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima atau dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam kurva penolakan dan penerimaan Hipotesis seperti pada gambar. 2 berikut ini:

Gambar. 2
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis Variabel PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap BM



4.1.4.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil Uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.5 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa:

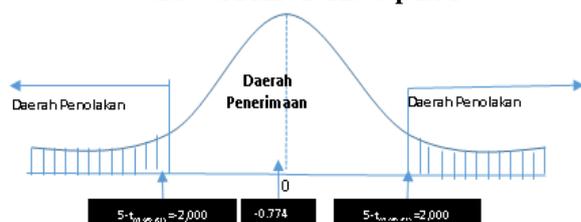
- Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

H_0 : Pendapatan Asli Daerah tidak Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

H_a : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Hasil Uji t untuk H_a diperoleh hasil t hitung sebesar -0,774 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,442 nilai signifikan untuk variabel PAD menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai t hitung $-0,774 < t$ -tabel sebesar 2,045 yang artinya H_a ditolak dan H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel PAD terhadap Belanja Modal, untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan dalam kurva penolakan dan penerimaan hipotesis pada gambar. 3 berikut ini:

Gambar. 2
Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Variabel PAD Terhadap BM



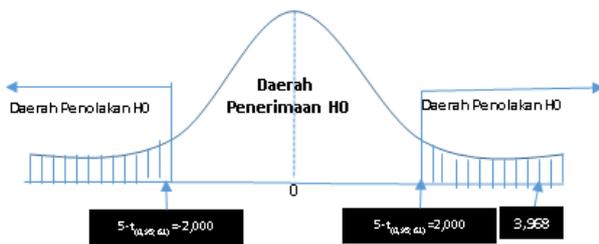
2. Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

H_0 : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

H_a : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Hasil Uji t untuk H_a diperoleh nilai t hitung sebesar 3.968 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel DAU menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai t hitung sebesar $3.968 > t$ tabel sebesar 2,045 yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan dalam kurva penolakan dan penerimaan hipotesis pada gambar. 3 berikut ini:

Gambar. 3
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hopotesis Variabel DAU Terhadap BM



3. Variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

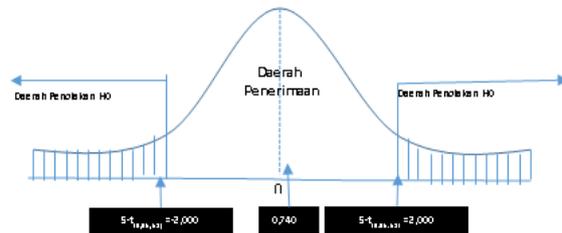
H_0 : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

H_a : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Hasil uji t untuk H_a diperoleh hasil t hitung sebesar 0,740 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,462. Nilai signifikan untuk Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai diatas tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai t hitung sebesar $0,740 < t$ tabel sebesar 2,045 yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan dalam kurva penolakan dan penerimaan hipotesis pada gambar. 4 berikut ini:

Gambar. 4
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hopotesis Variabel DAK Terhadap BM



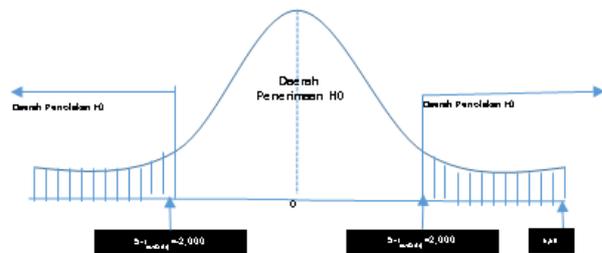
4. Variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

H_0 : Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi

H_a : Dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil Uji t untuk H_a diperoleh hasil t hitung sebesar 6.605 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai t hitung sebesar $6.605 > t$ tabel sebesar 2,045 yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak sehingga Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan dalam kurva penolakan dan penerimaan hipotesis pada gambar. 5 berikut ini:

Gambar. 5
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hopotesis Variabel DBH Terhadap BM



4.1.4.3. Koefisien Determinasi

Tabel. 8
Koefisien Determinasi Variabel PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap BM

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.648	.625	59840,01725

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS 23

Dari tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted R² adalah sebesar 0,625 hal ini berarti 62,5% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas PAD, DAU, DAK dan DBH. Sedangkan sisanya (100%-62,5% =37,5%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang diluar model penelitian.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dapat dipahami karena pada seluruh kabupaten/kota di provinsi jambi kontribusi Pendapatan Asli Daerah Masih terlalu rendah terhadap APBD Kabupaten/kota, sehingga dalam pengalokasian belanja Daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan rata-rata kontribusi PAD kabupaten/kota terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 5,5% .

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putro (2007), Swastika (2013), Wandira (2013) yang memberikan hasil temuan yang sama dengan penelitian ini bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara empiris penelitian ini telah membuktikan bahwa besarnya belanja modal pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih lebih besar dipengaruhi oleh dana Perimbangan khususnya DAU dan DBH yang diterima dari Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Pemerintah masih sangat tinggi.

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa tingkat kemandirian pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi jambi masih sangat rendah, terlihat dari tingkat kontribusi PAD hanya 5,5% terhadap Pendapatan Daerah, Penelitian ini sekaligus menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2013), Tuasikal (2008), Sumarni (2008), Suprayitno (2014) Suwardadi (2015), Kusnandar dan Siswanto (2012), Darwanto dan

Yustikasari (2007), Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan karena perbedaan karakteristik daerah yang diteliti dan kemampuan keuangan dari masing-masing daerah, antara di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa sangat berbeda.

4.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota di provinsi jambi yang mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang besar akan cenderung memiliki belanja Modal yang besar. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kabupaten/kota di provinsi jambi masih bergantung pada transfer dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dimana rata-rata 82,55% pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota di provinsi Jambi bersumber dari Transfer Pemerintah melalui Dana Perimbangan termasuk di dalamnya Dana Alokasi Umum.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) Dana Alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota di Indonesia, Putro (2007) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, Sudarwadi (2015) dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Sumarni (2008) Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, Swastika (2013) dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Darwanto dan Yustikasari (2007) dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Haryanto dan Adi (2007) Dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Situngkir (2009) Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa tingkat kemandirian pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi jambi masih sangat rendah, terlihat dari tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Transfer Pemerintah Pusat, dimana 82,55% sumber Pendapatan Daerah Berasal dari Dana perimbangan. Penelitian ini sekaligus menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2013) dan Kusnandar dan Siswanto (2012) yang menyatakan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

4.2.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal namun tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus (DAK) yang diterima oleh Kabupaten/kota di Provinsi Jambi merupakan komponen dari dana perimbangan yang secara absolut nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Bidang-bidang yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus terdiri dari bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, transportasi pedesaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Suwardadi (2015) dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi papua barat dan sekaligus menyanggah penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah di kabupaten/kota di provinsi D.I yogyakarta, Tuasikal (2008) Dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di kabupaten/kota di indonesia, Pratama (2013) dana Alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada provinsi jawa tengah, situngkir (2009) dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di kabupaten/kota di sumatera utara.

4.2.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil Penelitian diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki Pengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil yang besar cenderung memiliki Belanja Modal yang besar pula. Hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dari Dana Bagi Hasil. Karena Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan satu modal dasar pemerintah daerah yang bukan berasal dari PAD, selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan berdasarkan persentase yang didasarkan atas daerah penghasil.

Jadi dapat disimpulkan jika Dana Bagi Hasil meningkat maka alokasi belanja Modal juga ikut meningkat, begitu pula sebaliknya jika terdapat

penurunan atau pengurangan dana bagi hasil yang di transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada Belanja Modal pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan dwirandra (2015) yang menyimpulkan bahwa Dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di pada kabupaten/kota di provinsi bali, serta penelitian yang dilakukan oleh wandira (2015) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dana bagi hasil terhadap belanja modal.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan bahwa:

1. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Hasil yang ditunjukkan dengan hasil statistik Uji F dengan nilai signifikan sebesar 0,000 berada di bawah level 5% ($\alpha=0,05$).
2. Pengujian secara parsial untuk variabel Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Modal, Hasil Uji t untuk H_a diperoleh hasil t hitung sebesar -0,774 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,442 nilai signifikan untuk variabel PAD menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai t hitung -0,774 < t-tabel sebesar 2,045 yang artinya H_a ditolak dan H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel PAD terhadap Belanja Modal
3. Pengujian secara parsial untuk Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal, Hasil Uji t untuk H_a diperoleh nilai t hitung sebesar 3.968 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel DAU menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai t hitung sebesar 3.968 > t tabel sebesar 2,045 yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Pengujian secara parsial untuk Variabel Dana alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal, Hasil uji t untuk H_a diperoleh hasil t hitung sebesar 0,740 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,462. Nilai signifikan untuk Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai diatas tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai t hitung sebesar 0,740 < t tabel sebesar 2,045 yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

5. Pengujian secara parsial untuk Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal, Hasil Uji t untuk H_a diperoleh hasil t hitung sebesar 6.605 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai t hitung sebesar $6.605 > t$ tabel sebesar 2,045 yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak sehingga Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

5.2. Saran untuk penelitian selanjutnya

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Temuan Penelitian ini belum dapat mendeteksi variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi jambi. Untuk itu bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama perlu melengkapi data pada atau menambah tahun pengamatan yang lebih panjang
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambahkan variabel independen lain, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan dan peraturan pemerintah, partisipasi dalam penganggaran, dan kondisi makro ekonomi dll.

5.3. Rekomendasi

Era setelah otonomi daerah, dimana peran pemerintah daerah dituntut mengelola tanggung jawab keuangan lebih besar. Sejalan dengan hal tersebut maka sepatasnya pemerintah daerah berusaha menggerakkan investasi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota

- a) Untuk mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk alokasi belanja modal, dalam jangka panjang sebaiknya kabupaten/kota di provinsi jambi perlu mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- b) Melakukan optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu alternatif sumber penerimaan utama. Untuk itu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi perlu

mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi termasuk membenahi regulasi yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

- c) Belanja Modal pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi sangat dibatasi oleh Sumber Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Ditambah lagi, sumber penerimaan tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di provinsi jambi terbatas. Dengan belanja modal pemerintah yang tersedia, seharusnya dialokasikan secara tepat kepada proyek investasi yang mempunyai dampak *multiplier* yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan ke daerah-daerah produksi.

DAFTAR REFERENSI

- Sekaran, Uma, 1992. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*, Second Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Ghozali, Imam, 2011: *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2011
- Halim, Abdul. 2013. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat. 2014
- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi VI*, hal. 1140-1159.

- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. *Jurnal Ekonomi STEI*
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004. *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*. *JAAI Vol 8 No.2*, 101-118.
- Maimunah, Mutiara. 2006 *Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*”. *SNA X Makasar* 26-28 Juli 2007
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendaptan Per Kapita*. *SNA X Makasar* 26-28 Juli 2007
- Putro, Nugroh Suratno. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi kasus pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)* TESIS, Undip, 2007
- Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh DAU, Dak, PAD dan PDRB terhadap Balanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 1, No. 2 Juli 2008 Hal 142-155
- Masdojojo, Gregorius N. dan Sukartono. 2008, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis flypaper effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008*, *TEMA* ISSN: 1693-9727
- Sumarmi, Saptaningsih. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta*. Universitas PGRI. Yogyakarta.
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap penganggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara*. TESIS. Universitas Sumatera Utara. 2009
- Abrar, Muhammad. 2010, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.9 No.1 April 2010: 79-88.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia
- Swastika, Lingga. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Boyolali Periode tahun 2005-2012*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. 2013
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana bagi hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 2013
- Pratama, Hermawan Arga. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah dengan Periode 2010-2012*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Putra, Ida Bagus Dwi dan A.A.N.B. Dwirandra, 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah dan flypaper effect pada keuangan pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Bali*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.13.3 Desember (2015).
- Sudarwadi, Hustianto. 2015, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah (studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014)* SNEMA-2015. Padang. Indonesia
- Suprayitno, Bambang 2015. *Pengaruh Perumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran belanja Modal provinsi di Pulau jawa*, *JRAP* Vol.2 No1, Juni 2015
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02
Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

<http://www.batangharikab.go.id/>

<http://www.jambikota.go.id/>

<http://www.Muarojambikab.go.id/>

<http://www.bungokab.go.id/>

<http://www.tebokab.go.id/>

<http://www.tanjabtinkab.go.id/>

<http://www.tanjabbarkab.go.id/>

<http://www.kerincikab.go.id/>

<http://www.sungaipenuhkota.go.id/>

<http://www.sarolangunkab.go.id/>

<http://www.meranginkab.go.id/>